

Dinamika Persenjataan di Asia Tenggara, 2010-2015

Iwan Sulistyو*

iwan.sulistyو@fisip.unila.ac.id

Abstract

States, however, are still the main actors in International Relations. Although the Cold War had formally ended in 1991, as a matter of fact, the military competition still exists, including at the regional level. This article attempts to analyze the arms dynamic in Southeast Asia during the 2010-2015 periods. By using three models – action-reaction model, the domestic structure model, and the technological imperative – simultaneously and analyzing the data published by both the IISS and SIPRI, this study shows that conflict in the South China Sea had been the primary motive of several countries in increasing their military spending and enhancing their military capabilities, both qualities as well as quantities. Several countries accelerating their military strength had been Singapore, Malaysia, Vietnam, the Philippines, Myanmar, Thailand, and Indonesia. However, Singapore had been the leading actor that has significant efforts in strengthening its military power. Relizing the difficulty to identify the actual motives of these several countries enlarging their hard power, the author argues that, within this arms dynamic, there is also a possibility or even the long-term tendency in terms of arms race as long as these major actors that relates directly to the South China Sea territorial conflict are not able carefully to maintain their security dilemma and perceived threats.

Kata Kunci: *Arms dynamic, Southeast Asia, military capability*

*Staf Pengajar Tetap pada Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung

Pendahuluan

Berakhirnya Perang Dingin di penghujung 1980 dan awal 1990 menjadikan dinamika politik dunia memasuki babak baru. Hal itu ditandai dengan adanya tiga peristiwa internasional penting secara berturut-turut, yakni ambruknya Tembok Berlin (9 November 1989), unifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur (3 Oktober 1990), dan hancurnya Uni Soviet setelah pengunduran diri Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin negara pada 25 Desember 1991. Bubarnya Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat (AS) tampil sebagai satu-satunya negara adikuasa. Alhasil, persaingan keras secara ideologis dan kompetisi secara militer antara dua kekuatan besar dunia pun dianggap berakhir.

Perubahan yang signifikan dalam dinamika politik internasional tersebut tentu berdampak pula pada dinamika politik di level regional di semua belahan dunia, termasuk di Asia Tenggara. Periode sekitar awal 1990-an di kawasan Asia Tenggara ini menjadi kajian menarik bagi Alan Collins, seorang ilmuwan politik dari the University of Wales, yang secara khusus menyoroti dinamika keamanan.

Lewat salah satu bukunya yang berjudul *The Security Dilemmas of Southeast Asia*, Collins menunjukkan sejumlah pertanda bahwa regional Asia Tenggara masuk ke dalam “periode yang tidak pasti serta peningkatan ketegangan”, yaitu pembelian peralatan tempur oleh negara-negara di Asia Tenggara, persoalan teritorial yang semakin mengemuka, kehadiran Cina sebagai hegemoni regional, serta meluasnya ketegangan etnis.¹ Beberapa negara yang meningkatkan anggaran belanja persenjataannya ialah Indonesia (\$1,402 juta), Malaysia (\$1,133 juta), Filipina (\$810 juta), Singapura (\$2,337 juta), dan Thailand (\$1,653 juta).²

Mengacu pada pengamatan Collins di atas, menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana pula dinamika pembangunan kekuatan persenjataan di kawasan Asia Tenggara lebih dua dekade setelah berakhirnya Perang Dingin mengingat, di dalam masa dua puluh tahun itu, tentu telah banyak pergeseran dan perimbangan kekuatan

¹ Alan Collins, *The Security Dilemmas of Southeast Asia* (London: MacMillan Press, 2000), 1.

² *Ibid.*, 103-104.

yang memengaruhi arsitektur keamanan di tingkat regional Asia Tenggara.

Kendatipun Perang Dingin telah usai pada 1990-an dan perang ideologi pun dianggap berakhir, bukan berarti persaingan militer juga mengalami penurunan. Kompetisi militer ini dianggap niscaya terjadi mengingat sifat setiap negara-bangsa akan selalu bersaing untuk tampil menjadi yang terkuat, termasuk bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Upaya masing-masing negara untuk membangun kekuatan angkatan bersenjata secara terus-menerus akan memunculkan kondisi ‘perlombaan senjata’ dengan kadar tertentu. Ia juga merupakan dampak dari dilema keamanan di mana setiap negara selalu merasa ‘masih tidak’ atau ‘belum cukup kuat’ untuk mengimbangi postur (kekuatan dan kemampuan) negara-negara tetangganya.

Dinamika persenjataan di Asia Tenggara ini penting untuk dikaji karena, secara regional, terdapat serangkaian konflik yang berkaitan

dengan batas kedaulatan.³ Bila tidak dikelola dengan baik, maka spiral aksi-reaksi antarnegara dalam hal ‘mempersenjatai diri’ akan menjadi lebih tajam. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menjawab satu pertanyaan mendasar: Bagaimana dinamika persenjataan di kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu 2010-2015?

Metode dan Kerangka Analitis

Dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari publikasi oleh the IISS dan SIPRI, penelitian ini menggunakan pemahaman

³ Terdapat cukup banyak sengketa teritorial antarnegara di Asia Tenggara yang di dalam penelitian ini diasumsikan dapat menjadi pencetus kemungkinan konflik atau bahkan perang berskala kecil dan besar di antara negara-negara di Asia Tenggara. Mereka antara lain: Klaim Filipina atas Sabah (Malaysia); Persaingan dalam klaim pulau-pulau dan terumbu di Spratlys yang melibatkan Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina; Batas sengketa antara Indonesia dan Vietnam pada garis demarkasi di landas kontinen dekat Pulau Natuna; Sengketa perbatasan antara Vietnam dan Kamboja; Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Vietnam pada garis demarkasi lepas pantai antara keduanya; Sengketa antara Malaysia dan Singapura soal kepemilikan Pulau Batu Putih; Persaingan klaim [yang sebagian pernah dan masih terjadi] oleh Malaysia dan Indonesia atas Pulau Sipadan, Sebatik, dan Ligitan serta perbatasan antara Sarawak dan Kalimantan di Pulau Kalimantan (Borneo); Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Thailand; serta Sengketa perbatasan antara Thailand dan Burma. Lihat selengkapnya D. Ball, ‘Arms and Affluence: Military Acquisitions in the Asia-Pacific Region’, *International Security*, vol. 18, no. 3, Winter, 1993/94, 88, sebagaimana dikutip dalam Ibid., 102.

fundamental dalam mazhab realisme di mana politik internasional dipandang sebagai perebutan kekuasaan.⁴ Dalam cara pandang ini, struktur internasional secara mendasar bersifat anarkis dan masing-masing negara akan selalu meraih kepentingan nasionalnya. Di dalam situasi yang anarkis, watak negara yang mengutamakan dirinya sendiri dianggap sebagai suatu perilaku yang logis. Bahkan, hingga kini, menurut Donald Watherbee, seorang pakar Asia Tenggara terkemuka, realisme merupakan pendekatan yang dominan dalam upaya menelaah hubungan internasional di Asia Tenggara.⁵

Tulisan ini menggunakan konsep dinamika persenjataan (*arms dynamic*) dalam spektrum yang luas. Konsep ini dianggap lebih relevan dari satu konsep lainnya yang masih berdekatan, dalam hal ini yakni ‘perlombaan senjata’ (*arms races*), karena ‘dinamika persenjataan’

dianggap lebih mewakili keseluruhan cakupan yang besar. Sebab, konsep perlombaan senjata sendiri cenderung ambigu dalam membedakan kondisi atau relasi yang normal dan tidak ketika masing-masing negara menambah kekuatannya.⁶ Terkait sejumlah konsep lainnya yang juga masih berdekatan, Buzan menjelaskan:

The terms *arms racing* is reserved for the most extreme manifestations of the arms dynamic, when the pressures are such as to lead states into major competitive expansions of military capability. The term *maintenance of the military status quo* is used to express the normal operation of the arms dynamic. Maintenance of the military status quo and arms racing can be used to describe either the activity of a single state, or the character of a relationship between two or more states.⁷

Agar lebih operasional, terdapat tiga model yang dipandang tepat sebagai alat analitis dalam mengkaji dinamika persenjataan, yang sebenarnya model-model ini utamanya digunakan untuk memahami perlombaan senjata. *Pertama, action-reaction model* yakni penjelasan soal dimensi eksternal dari suatu negara yang kemudian mendorong dinamika

⁴ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*, 6th edn, edisi Bahasa Indonesia *Politik Antarbangsa*, diterjemahkan oleh S.Maimoen, A.M. Fatwan, dan Cecep Sudrajat (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 33. Karya klasik ini terbit pertama kali pada tahun 1948.

⁵ Lihat Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia: the Struggle for Autonomy*. 2nd edn. (Plymouth: Rowman & Littlefield, 2009), 19.

⁶ Barry Buzan, *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations* (London: MacMillan Press, 1987), 72-73.

⁷ *Ibid.*, 73.

persenjataan. Di dalam model ini, akan diidentifikasi sejumlah variabel: *magnitude* (besaran atau ukuran – terkait dengan proporsi reaksi apa yang mendorong munculnya reaksi), *timing* (pilihan waktu – kecepatan atau urutan reaksi), dan *awareness* (kesadaran – sejauh mana masing-masing negara yang terlibat dalam proses menyadari risiko yang ada).⁸ Kedua, *the domestic structure model* yang berhubungan dengan faktor domestik dari suatu negara sehingga menjadikan ia terlibat dalam dinamika persenjataan, misalnya kondisi ekonomi, organisasi, serta pelembagaan riset.⁹ Ketiga, *the technological imperative* yang menjelaskan soal kemajuan teknologi.¹⁰ Ketiga model ini digunakan secara terpadu walaupun, menurut Buzan, akan sulit dalam implementasinya.

Argumen Pokok

Penulis berargumen, aksi-reaksi antarnegara yang terjadi dalam konteks dinamika persenjataan di Asia Tenggara dalam kurun 2010 hingga 2015 lebih didorong oleh faktor eksternal, yaitu konflik di Laut

Tiongkok Selatan, bukan dimotivasi oleh aspek domestik. Sejumlah negara di Asia Tenggara, terutama Singapura, Malaysia, Indonesia, telah terlibat secara intens dalam upaya penambahan jumlah anggaran pertahanan serta kapabilitas persenjataan untuk mengimbangi kekuatan negara-negara lain, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kompetisi persenjataan ini, patut diduga, akan mengarah pada perlombaan senjata dalam kadar yang rendah atau menengah di masa depan.¹¹ Dalam kondisi dilema keamanan yang demikian, sejumlah negara bersikap rasional sehingga berupaya mengamankan kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain, persepsi ancaman, khususnya ancaman militer,

¹¹ Bahkan, Malcolm R. Davis, seorang asisten profesor pada Bond University, menulis artikel berjudul *Arms Races, Security Dilemmas and Territorial*. Menelaah kecenderungan modernisasi militer di kawasan Asia, Davis menyelidiki apakah kecenderungan itu akan berdampak pada perlombaan senjata dalam beberapa tahun mendatang. Ia secara jelas berargumen bahwa modernisasi peralatan militer negara-negara di kawasan Asia mengarah pada kemunculan perlombaan senjata sebagai implikasi dari persoalan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Artikel Davis ini memang cukup komprehensif dalam menguraikan persoalan dilema keamanan dan perlombaan senjata. Namun, ia masih berfokus pada regional Asia, bukan spesifik pada kawasan Asia Tenggara. Lihat selengkapnya Malcolm R. Davis, 'Arms Races, Security Dilemmas and Territorial', tersedia di <http://epublications.bond.edu.au/eassc_publications/45/>, diakses 7 Maret 2016.

⁸ Ibid., 74-76 dan 84.

⁹ Ibid., 96.

¹⁰ Ibid., 74.

serta perasaan curiga terhadap negara-negara lain dalam kaitan dengan Laut Tiongkok Selatan, sangat memengaruhi perilaku sejumlah negara.

Laut Tiongkok Selatan sebagai Pemicu Utama

Ketika artikel ini ditulis, isu di area *South China Sea* (Laut Tiongkok Selatan) cukup dan bahkan, pada kadar tertentu sangat kritikal. Sengketa di area ini melibatkan sejumlah negara yang sebagian besar berada di kawasan Asia Tenggara (Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam) dan sebagian di Asia Timur (utamanya Republik Rakyat Tiongkok). Hal ini menjadikan kawasan Asia Tenggara sangat rentan tersulut konflik bilamana eskalasinya mengarah pada kondisi yang kian rumit.

Sebelum dikemukakan ihwal mengapa Laut Tiongkok Selatan begitu penting dan strategis, penting untuk memahami cakupan luas wilayah serta jumlah penduduk yang dimiliki oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara agar diperoleh pemahaman yang cukup tentang peta kekuatan nasional dari aspek wilayah dan jumlah penduduk masing-masing

negara, sebagaimana diperlihatkan oleh Tabel 1.

Tabel 1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara¹²

Negara	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk
Brunei Darussalam	5.765	429.646
Kamboja	181.035	15.708.756
Indonesia	1.904.569	255.993.674
Laos	236.800	6.911.544
Malaysia	329.847	30.513.848
Myanmar	676.578	56.320.206
Filipina	300.000	100.998.376
Singapura	697	5.674.472
Thailand	513.120	67.976.405
Vietnam	331.210	94.348.835

Dari tabel tersebut tampak bahwa Indonesia merupakan negara yang terbesar dari segi geografis dan demografis. Sementara, yang terkecil dalam aspek luas wilayah ialah Singapura; dan Brunei Darussalam merupakan negara dengan total penduduk yang paling sedikit. Sebagai

¹² Diolah dari Statistics Times, *List of Asian countries by Area (2014)* (online), <<http://statisticstimes.com/geography/asian-countries-by-area.php>> diakses 13 November 2016, serta IISS, *The Military Balance 2016* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2016).

tambahan, walaupun berada di kawasan Asia Timur, tetapi sangat berhubungan dengan sengketa di Laut Tiongkok Selatan, Republik Rakyat Tiongkok memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, yakni sebesar 1.374.626.494¹³; dan luas wilayahnya sekitar 9.596.960 km².¹⁴

Memuat dimensi historis yang cukup panjang yaitu terkait kehadiran koloni dan perdebatan hukum internasional sebagai akar persoalan, sengketa di Laut Tiongkok Selatan semakin dipertajam oleh posisi/letak yang penting atas dasar aspek geopolitis dan geo-strategis serta fakta yang terungkap bahwa di bawahnya terdapat potensi sumber daya alam, yaitu minyak bumi dan gas, di samping utamanya ialah ikan.¹⁵ Dengan begitu, motif utama bagi sejumlah negara dalam mengklaim Laut Tiongkok Selatan ialah karena sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, baik di

dalam laut dan terlebih yang ada di bawah lautnya. Dijelaskan bahwa:

The South China Sea is a semi-enclosed sea located south of mainland China and Taiwan, east of Vietnam, west of Philippines and north of Brunei and Malaysia. It has a vast number of insular features, most of which are uninhabited. Of these, the most important (hence most contested) island groups are the Paracels and the Spratlys. The claims by China, Vietnam, Philippines, Malaysia, Brunei, and Taiwan (Republic of China) over these groups of islands and rocks, which have been occupied by various claimant countries, have been an on-going source of tension and even conflict in the South China Sea, which in turn undermine the peace and stability of the entire Asia-Pacific region.¹⁶

Peningkatan Anggaran Pertahanan yang Relatif Konsisten

Salah satu indikator yang dapat mendukung argumen bahwa di kawasan ini memang terjadi “kompetisi persenjataan yang kemungkinan akan mengarah pada perlombaan senjata yang tidak terlalu ekstrem” ialah peningkatan anggaran pertahanan. Namun, sebelum lebih jauh mengelaborasi peningkatan anggaran belanja militer negara-negara di Asia Tenggara, ada baiknya dipetakan terlebih dahulu kekuatan di

¹³ IISS, *The Military Balance 2016* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2016).

¹⁴ Statistics Times, *List of Asian countries by Area (2014) (online)*, <<http://statisticstimes.com/geography/asian-countries-by-area.php>> diakses 13 November 2016.

¹⁵ Lihat Nguyen Thi Lan Anh, ‘Origins of the South China Sea Dispute’ dalam Jing Huang and Andrew Billo, *Territorial Disputes in the South China Sea: Navigating Rough Waters* (New York: Palgrave Macmillan, 2015), 15-35.

¹⁶ Jing Huang and Sharinee Jagtiani, ‘Introduction: Unknotting Tangled Lines in the South China Sea Dispute’ dalam *ibid.*, 1.

tingkat global mengingat, Tiongkok sendiri – yang merupakan aktor besar yang sangat diperhitungkan di kawasan Asia secara umum dan Laut Tiongkok Selatan secara khusus – termasuk dalam kelompok negara-negara pada ranking lima terbesar dari aspek anggaran militernya.

Tabel 2

Sepuluh Negara dengan Ranking Teratas dalam Alokasi Anggaran Pertahanan di Dunia¹⁷

No.	Negara	Anggaran Pertahanan (milyar US\$)
1	Amerika Serikat	597,5
2	Tiongkok	145,8
3	Arab Saudi	81,9
4	Rusia	65,6
5	Kerajaan Inggris	56,2
6	India	48,0
7	Prancis	46,8
8	Jepang	41,0
9	Jerman	36,7
10	Korea Selatan	33,5

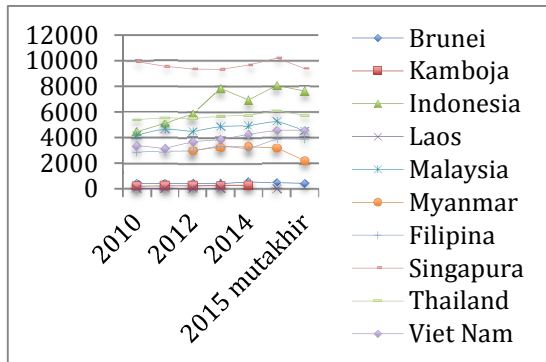
Tabel 2 di atas menyajikan sepuluh negara yang berada di urutan teratas dalam hal alokasi anggaran belanja pertahanannya. Di situ tampak

bahwa Amerika Serikat masih merupakan negara yang terkuat dari dimensi alokasi anggaran pertahanan, yaitu sebesar US\$597.5 milyar, disusul oleh Republik Rakyat Tiongkok, US\$145 milyar. Kendatipun berada di urutan kedua terbesar di dunia, tetapi anggaran pertahanan Tiongkok ini masih seperempat dari total anggaran pertahanan Amerika Serikat.

Lazimnya, beragam negara yang mempunyai kekuatan dan kemampuan pertahanan yang mumpuni cenderung menyediakan dana untuk bidang pertahanannya dengan besaran yang signifikan. Hal itu kemudian akan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan akan armada perang.

¹⁷ IISS, *The Military Balance 2016* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2016), 19.

Grafik 1
Belanja Militer Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (juta US\$), 2010-2015¹⁸



Sedangkan di Asia Tenggara, secara umum, belanja pertahanan terbesar adalah Singapura (garis merah, paling atas). Walaupun pernah di posisi \$9,928 juta pada tahun 2010 dan kemudian perlahan menurun berturut-turut di angka \$9,574 juta (tahun 2011), \$9,355 juta (2012), \$9,323 juta (tahun 2013); tetapi, belanja militer Singapura mengalami kenaikan pada tahun 2014, yaitu menjadi \$9,668 juta, dan bahkan mencapai \$10,213 juta. Namun, dalam kondisi tahun 2015 mutakhir, turun menjadi \$9,417 juta. Adapun rincian anggaran belanja

militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat dilihat pada Grafik 1.

Berdasarkan Grafik 1 di atas, belanja militer Singapura berada pada tingkatan teratas disusul Indonesia, yang berada di bawahnya, berfluktuasi. Kendatipun sempat berada di bawah Malaysia, tetapi ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2010-2013, dengan dimulai pada angka \$4,444 juta di tahun 2010, lalu naik menjadi \$5,095 juta (tahun 2011), \$ 5,850 juta (tahun 2012), bahkan hingga \$7,865 juta (tahun 2013). Sayangnya, pada tahun 2014, hal itu sempat mengalami sedikit penurunan, yaitu menjadi \$6,929 juta, tetapi menanjak kembali pada tahun 2015, yakni sebesar \$8,071 juta. Lagi-lagi, kondisi tahun 2015 mutakhir menunjukkan sedikit penurunan, yakni \$ 7,641 juta.

Malaysia tampaknya, yang paling stabil dan konsisten ialah Malaysia walaupun sempat berada di atas Indonesia pada tahun 2010 (\$4,191 juta) hingga 2011 (\$4,697 juta). Kenaikan anggaran pertahanan Malaysia ini tidak begitu signifikan dari tahun ke tahun, yaitu \$4,480 juta (tahun 2012), \$4,881 juta (tahun 2013), \$4,919 juta (tahun 2014), hingga di

¹⁸ Diolah dari SIPRI, *The SIPRI Military Expenditure Database (online)*, <<https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1988-2015.xlsx>>, diakses 13 November 2016.

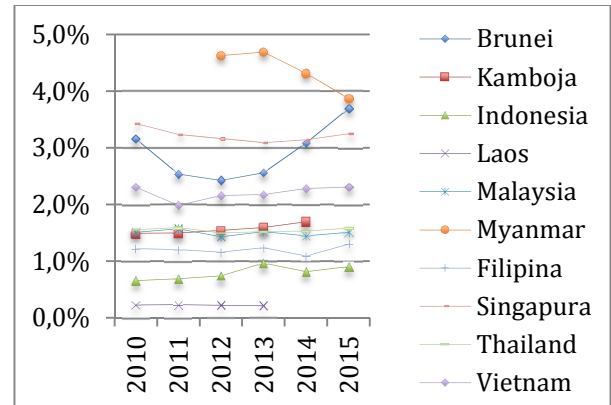
posisi \$5,300 juta (tahun 2015 mutakhir).

Sementara itu, upaya perlahan negara-negara di Asia Tenggara dalam mengalokasikan belanja militernya juga tampak dalam perhitungan persentase terhadap GDP (*Gross Domestic Product*) atau PDB (Produk Domestik Bruto) sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 2. Akan tetapi, alokasi yang besar untuk anggaran pertahanan dari PDB oleh beberapa negara tertentu bukan berarti jumlah anggaran pertahanannya adalah yang terbanyak. Ia hanya merefleksikan keseriusan suatu negara dalam menganggarkan dana untuk sektor pertahanannya dari jumlah PDB yang mereka miliki.

Walaupun tidak diperoleh data yang lengkap sejak tahun 2010, dan data yang digunakan di dalam penelitian ini pun (khusus Myanmar) adalah perkiraan; tetapi, Myanmar merupakan negara yang paling tinggi dalam menyisihkan PDB-nya untuk keperluan belanja militer, yaitu sebesar 4,6 persen (tahun 2012), meningkat sedikit menjadi 4,7 persen (tahun 2013), lalu turun ke posisi 4,3 persen (tahun 2014) dan 3,9 persen (tahun 2015).

Grafik 2

Belanja Militer Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, 2010-2015
(menurut persentase terhadap GDP)¹⁹



Singapura lagi-lagi merupakan negara dengan alokasi anggaran militer yang relatif konsisten dan stabil dibandingkan dengan negara-negara lain. Dimulai dari 3,4 persen (tahun 2010), 3,2 persen (tahun 2011 dan 2012), turun sedikit menjadi 3,1 persen (tahun 2013 dan 2014), lalu kembali naik ke angka 3,2 persen (tahun 2015). Di pihak lain, Brunei tampaknya memiliki fokus yang cukup diperhitungkan dalam alokasi belanja militer dari besaran PDB-nya; dimulai dari angka 3,2 persen (tahun 2010), 2,5 persen (tahun 2011), 2,4 persen (tahun 2012), 2,6 persen (tahun 2013), 3,1 persen (tahun 2014), dan 3,7 persen

¹⁹ Diolah dari *The SIPRI Military Expenditure Database (online)*.

(tahun 2015). Dua negara lainnya, Indonesia dan Laos, masih mengalokasikan anggaran belanja militernya di bawah 1 persen dari PDB.

Pembangunan Kekuatan Pertahanan yang Intens²⁰

Selain alokasi untuk anggaran pertahanan, indikator lain yang juga dapat dijadikan dasar argumen bahwa di kawasan ini memang terjadi kompetisi persenjataan yang kemungkinan akan mengarah pada perlombaan senjata yang relatif kuat ialah fakta bahwa memang terdapat penambahan yang cukup signifikan dari aspek kualitas dan kuantitas peralatan militer oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Pada bagian ini akan diperlihatkan bahwa hampir sebagian besar negara-negara yang terlibat dalam sengketa teritorial dalam mengklaim Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari kedaulatannya telah berupaya meningkatkan kekuatan militer mereka, yakni Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Myanmar, dan – walaupun

tidak terlibat secara langsung dalam klaim itu – Indonesia.

Menurut Reviu NIDS (*East Asian Strategic Review*) tahun 2011, Vietnam (pada Desember 2009) melakukan penguatan armada militernya dengan program pembelian enam unit kapal selam kelas *Kilo* serta delapan unit pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2 dari Rusia.²¹ Bahkan pada Februari 2010, Vietnam juga menyepakati pembelian tambahan atas dua belas unit Sukhoi. Selanjutnya, pada Mei 2010, juga ada rencana pembelian enam unit DHC-6 pesawat patrol yang akan dikirim pada rentang 2012 - 2014 oleh *Viking Air of Canada*. Vietnam juga membangun kerja sama dengan Israel guna pembelian *short-range ballistic missile systems*.²²

Hal yang sama juga dilakukan oleh Malaysia. Pada Januari 2009, Malaysia memperkuat angkatan lautnya dengan membeli dua unit kapal selam kelas *Scorpene*; dan memperoleh pengiriman yang pertama pada Januari 2009 dan menyusul yang kedua pada bulan Juli 2009. Penambahan bagi

²⁰ Paparan pada bagian ini didasarkan utamanya dari data yang dipublikasi oleh NIDS (the National Institute for Defense Studies) dan IISS (the International Institute for Strategic Studies).

²¹ NIDS, *East Asian Strategic Review 2011* (Tokyo: NIDS, 2011), 162-163.

²² *East Asian Strategic Review 2011*, 163.

angkatan laut Malaysia juga dilakukan dengan pembangunan terhadap enam unit *coast guard cutters* kelas *Kedah*.²³

Pada 2012, NIDS kembali melakukan reviu. Di sini disebutkan bahwa isu Laut Tiongkok Selatan masih merupakan pendorong utama bagi beberapa negara untuk membeli peralatan militer. Kali ini yang memperkuat diri ialah Filipina, Vietnam, dan Indonesia.²⁴ Filipina membeli *The US Coast Guard Cutter* kelas *Hamilton* (tiba pada Agustus dan November 2011) serta rencana pembelian kedua yang akan tiba pada tahun 2012. Di samping itu, juga ada rencana pemerintah Filipina untuk membeli sejumlah peralatan dengan dana 8 milyar peso, antara lain *patrol boats*, *patrol planes*, dan *air defense radar systems*.²⁵

Tidak sampai di situ, upaya Filipina ini pun diperkokoh dengan tambahan biaya sebesar 4,95 milyar peso sebagai wujud penguatan kekuatan pertahanan di wilayah Laut Tiongkok Selatan, termasuk pula rencana terhadap *installing* sembilan *radar* di kawasan *Spratly Islands*. Juga

peningkatan lapangan terbang di *Pagasa Island*, pembelian enam unit pesawat tempur jenis TA-50 *Golden Eagle* dengan Korea Selatan dan M-346 dengan Italia. Bahkan, pada 2020, Angkatan Laut Filipina bermaksud untuk memiliki satu unit kapal selam.²⁶

Sementara itu, usaha dalam menambah armada angkatan bersenjata juga dilakukan oleh Vietnam dengan modernisasi peralatan dan fasilitasnya. Menariknya, upaya ini pun masih berkaitan dengan dinamika yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan di mana Vietnam hendak memastikan bahwa kendali efektif disana adalah bagian dari pertahanannya.²⁷ Armada militer yang dibeli ialah dua unit *frigate* kelas *Gepard* dari Rusia (diterima pada Maret 2011 dan yang kedua menyusul pada bulan Juli). Sebagai pemasok utama persenjataan ke Vietnam, Rusia tampaknya menjalin kontrak dengan Vietnam lebih lanjut, yakni penambahan *coastal defense systems*. Selain itu, menurut jadwal, pada 2015 atau 2016, Vietnam juga akan menerima kiriman kapal selam kelas *Kilo* untuk pertama kalinya; ini

²³ *East Asian Strategic Review 2011*, 163-164.

²⁴ NIDS, *East Asian Strategic Review 2012* (Tokyo: NIDS, 2012), 155.

²⁵ NIDS, *East Asian Strategic Review 2012*, 155.

²⁶ NIDS, *East Asian Strategic Review 2012*, 155-156.

²⁷ NIDS, *East Asian Strategic Review 2012*, 156.

merupakan hasil pembelian tahun 2009.²⁸

Bekerja sama dengan Korea Selatan, Indonesia melakukan pembelian T-50 *training aircraft*, termasuk kontrak untuk tiga unit kapal selam kelas *Changbogo*,²⁹ termasuk berkolaborasi dengan perusahaan Tiongkok dalam pembuatan C-705 dan C-802 *anti-ship missiles*.³⁰

Di dalam publikasi IISS, *the Military Balance 2013*, disebutkan bahwa Filipina melanjutkan modernisasi militernya (yang disetujui pada September 2012) yang tidak secara penuh terealisasi dari segi anggaran. Filipina juga meminta bantuan Amerika Serikat untuk alat pukul, seperti pesawat tempur F-16, kapal angkatan laut, serta sistem radar.³¹ Upaya penambahan senjata oleh Filipina ini tampaknya didorong oleh situasi keamanan domestik, yaitu guna menangani kelompok oposisi, *Moro Islamic Liberation Front*.³²

²⁸ NIDS, *East Asian Strategic Review 2012*, 156.

²⁹ NIDS, *East Asian Strategic Review 2012*, 156.

³⁰ IISS, *The Military Balance 2012* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2012).

³¹ IISS, *The Military Balance 2013* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2013), 245.

³² *The Military Balance 2013*, 246.

Bila dinamika keamanan di kawasan Laut Tiongkok Selatan utamanya memengaruhi beberapa negara di Asia Tenggara dalam menambah kekuatan dan kemampuan armada tempurnya, khususnya persepsi ancaman terhadap Tiongkok, Malaysia justru menjalin relasi yang dekat dengan Beijing. Buktinya, pada September 2012, Malaysia berencana membeli sistem misil buatan Tiongkok.³³ Namun, pengakuan bahwa meningkatnya kekuatan Tiongkok oleh Malaysia masih terlihat dari pembelian enam unit kapal perang domestik serta delapan belas pesawat tempur, juga Su-30 MKM. Lain halnya dengan Singapura yang secara serius membenahi sistem C4I dan pelatihan serta gelar armada militernya.³⁴

Sementara, Thailand meningkatkan anggaran militernya sebesar 7 persen sebagai bagian dari respon terhadap konflik dan kekerasan. Juga, dua belas pesawat tempur *Saab Gripen*, dua unit kapal perang, dan enam unit kapal selam. Di sisi lain, Myanmar tampaknya masih memberikan perhatian yang cukup

³³ *The Military Balance 2013*, 246.

³⁴ *The Military Balance 2013*, 246.

besar pada sejumlah pemberontakan etnis minoritas.³⁵

Merujuk pada *the Military Balance 2014*, Singapura secara serius mengembangkan armada angkatan udaranya, yaitu dengan memesan lebih dari dua belas unit F-15SG untuk mengganti F-5S. Selain itu, dilakukan pula penguatan di matra laut dengan penguatan *upper-tier land-based air-defense system*, pemutakhiran F-16C/D dengan penguatan radar, termasuk pula upaya modernisasi kapal selam kelas *Archer*.³⁶

Di pihak lain, Vietnam juga melakukan penguatan armada militer udaranya sebagai respon terhadap klaim Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan, yaitu dengan pelatihan terhadap enam kapal selam 636 kelas *Killo* yang dipesan pada 2009 silam. Bahkan, Vietnam juga melanjutkan modernisasi tambahan dua belas unit Su-30MK2 dari Rusia.³⁷ Data *the Military Balance 2014* masih menyebutkan bahwa Malaysia tetap berupaya menjalin relasi yang dekat dengan Tiongkok kendatipun tetap berhati-hati dalam mengelola isu Laut

Tiongkok Selatan. Isu di Blok Ambalat terkait kandungan gas yang menjadikan Malaysia sedikit berkonflik dengan Indonesia pun masih menjadi kondisi yang mengemuka.³⁸ Di sisi lain, Thailand melakukan upaya penambahan armada militer dengan memfokuskan perhatian pada penguatan matra laut dan udara, termasuk radar dan sistem komunikasi.³⁹

Publikasi IISS berikutnya, yakni *the Military Balance 2015*, menyatakan bahwa, sejak 2011, Myanmar melakukan pembelian armada militer untuk matra laut, termasuk dua unit Type-053H1 *Jinghu* II-class dari Tiongkok, dan enam unit kapal perang buatan dalam negeri kelas *Aung Zeya*.⁴⁰ Selain itu, juga ada pesawat tempur 20 MiG-29 *Fulcrum* dari Rusia yang dikirim pada 2011-2013, helikopter serbu Mi-35 serta misil *surface-to-air S-125 Pechora-2M (SA-3 Goa)*. Selain tambahan rencana pembelian pesawat tempur JF-17, Myanmar juga berupaya secara serius memperluas industri pertahanannya,

³⁵ *The Military Balance 2013*, 246.

³⁶ IISS, *The Military Balance 2014* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2014), 202.

³⁷ *The Military Balance 2014*, 202.

³⁸ *The Military Balance 2014*, 202.

³⁹ *The Military Balance 2014*, 203.

⁴⁰ IISS, *The Military Balance 2015* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2015), 226.

antara lain memproduksi persenjataan kecil serta pelatihan pesawat jet.⁴¹

Sementara itu, Vietnam menjalin kerja sama dengan Rusia dalam mempertanggung postur militernya, antara lain enam unit kapal selam kelas *Killo* serta kapal perang.⁴² Selain dengan Rusia, Vietnam juga membina hubungan baik dengan Belanda dalam penguatan armada laut, yaitu untuk dua unit kapal perang kelas *Sigma*.⁴³ Selama tahun 2014, di sisi lain, Filipina justru melakukan rencana modernisasi terhadap peralatan angkatan lautnya, yaitu dua unit kapal perang kelas *Gregorio del Pilar* serta dua unit *antisubmarine helicopters*.⁴⁴

Indonesia melakukan penguatan postur matra lautnya, yaitu penambahan dua unit kapal perang kelas *Bung Tomo* dan bahkan, menjelang tahun 2017, selain berupaya mengembangkan produksi kapal selam dalam negeri, Indonesia juga akan mengimpor dua unit kapal selam U209 kelas *Chang Bogo* dari Korea.⁴⁵

Data *the Military Balance 2016* merilis bahwa menjelang Agustus

2015, sebagai bagian dari respon terhadap dinamika di Laut Tiongkok Selatan, Vietnam menambah empat dari enam proyek kapal selam kelas Kilo-nya yang dipesan dari Rusia.⁴⁶ Penguatan armada tempur juga dilakukan oleh Filipina dengan pembelian dua belas unit pesawat tempur latih dari Korea Selatan jenis FA-50PH; juga pembelian sistem *shore-based missile*. Hal ini merupakan wujud perhatian terhadap isu di Laut Tiongkok Selatan.⁴⁷

Masih menurut *the Military Balance 2016*, Malaysia juga ikut di dalam pembelian pesawat tempur guna mengganti MiG-29s, pesawat patroli, dan helikopter anti-kapal selam. Saat Indonesia memprioritaskan pengembangan kapal selam dan dua belas boats. Juga, tiga unit boats kelas *Chang Bogo* akan dikirim pada 2017, Singapura justru berupaya memperkuat postur pertahanannya dengan komprehensif, yaitu dengan pemutakhiran F-16C/D, sistem radar, dan lain-lain.⁴⁸

⁴¹ *The Military Balance 2015*, 226.

⁴² NIDS, *East Asian Strategic Review 2015* (Tokyo: NIDS, 2015), 153.

⁴³ *East Asian Strategic Review 2015*, 155.

⁴⁴ *East Asian Strategic Review 2015*, 156.

⁴⁵ *East Asian Strategic Review 2015*, 159.

⁴⁶ IISS, *The Military Balance 2016* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2016), 212.

⁴⁷ *The Military Balance 2016*, 213.

⁴⁸ *The Military Balance 2016*, 213.

Perbandingan Kekuatan Militer di Asia Tenggara tahun 2015

Jumlah Personel Militer Aktif

Jika dicermati, dimensi postur pertahanan, kekuatan dan kemampuan militer masing-masing negara di Asia Tenggara, khususnya dari aspek jumlah personel militer aktif (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), terlihat sangat bervariasi. Dalam Tabel 3 berikut, disajikan perbandingan jumlah personel militer aktif masing-masing negara di Asia Tenggara, khususnya pada tahun 2016.

Tabel 3

Perimbangan Kekuatan Personel Militer Aktif Negara-negara di Asia Tenggara (2016)⁴⁹

Negara	AD	AL	AU	Jumlah Personel Aktif	Paramiliter	Cadangan
Brunei	4.900	1.000	1.100	7.000	2.250	700
Indonesia	300.400	65.000	30.100	395.500	281.000	400.000
Kamboja	75.000	2.800	1.500	124.300	67.000	45.000 ⁵⁰
Laos	25.600	-	3.500	29.100	100.000	-
Malaysia	80.000	14.000	15.000	109.000	244.700	51.600
Myanmar	375.000	16.000	15.000	406.000	107.250	-
Filipina	86.000	24.000	15.000	125.000	40.500	131.000

⁴⁹ Diolah dari *The Military Balance 2016*.

⁵⁰ *Provincial forces*.

Singapura	50.000	9.000	13.500	72.500	75.100	312.500
Thailand	245.000	69.850	46.000	360.850	92.700	200.000
Vietnam	412.000	40.000	30.000	482.000	40.000	5.000.000

Berdasarkan Tabel di atas, Vietnam merupakan negara dengan jumlah personel militer aktif terbanyak di kawasan Asia Tenggara, yaitu 482.000 personel, menyusul Myanmar dengan 406.000 personel; yang paling sedikit ialah Brunei (7.000 personel). Menariknya, tiga negara, yakni Malaysia, Myanmar, dan Filipina, memiliki jumlah personel angkatan udara yang sama, yaitu 15.000 personel. Dari aspek jumlah paramiliter, Indonesia ialah yang paling banyak, 281.000 personel; yang paling minim ialah Brunei, 2.250 personel. Dalam konteks jumlah pasukan cadangan, Vietnam masih yang terbanyak, yakni 5.000.000.

Jumlah Persenjataan

Angkatan Darat

Selain jumlah personel militer aktif, variasi kekuatan dan kemampuan militer juga dapat dikaji dari jumlah senjata yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Tabel 4 berikut ini

memperlihatkan jumlah kekuatan dan kemampuan militer yang dimiliki oleh Angkatan Darat masing-masing negara di Asia Tenggara. Tampak bahwa Singapura adalah negara dengan jumlah persenjataan ACV terbanyak, yakni 2.124+ unit, disusul Malaysia sebesar 1.083+. Dari tabel tersebut, Singapura ialah negara yang memiliki persenjataan di hampir semua varian, terbanyak dalam AIVF (707+ unit) dan APC (1.395+ unit). Vietnam memiliki LT yang paling banyak, yakni 620 unit. Menariknya, dalam konteks LT, Singapura dan Indonesia terlihat berimbang, yaitu 350 unit. Namun, harus diakui, yang memiliki jumlah MBT terbanyak ialah Vietnam, 1.270 unit. Di pihak lain, Thailand justru mempunyai artileri yang paling banyak, 2.622 un

Tabel 4
Perimbangan Kekuatan Peralatan
Angkatan Darat
Negara-negara di Asia Tenggara
(2016)⁵¹

Negara	AD	AL	AU	Jumlah Personel Aktif	Para-militar	Cadangan
Brunei	4.900	1.000	1.100	7.000	2.250	700
Indonesia	300.400	65.000	30.100	395.500	281.000	400.000
Kambaja	75.000	2.800	1.500	124.300	67.000	45.000 ⁵²
Laos	25.600	-	3.500	29.100	100.000	-
Malaysia	80.000	14.000	15.000	109.000	244.700	51.600
Myanmar	375.000	16.000	15.000	406.000	107.250	-
Filipina	86.000	24.000	15.000	125.000	40.500	131.000
Singapura	50.000	9.000	13.500	72.500	75.100	312.500
Thailand	245.000	69.850	46.000	360.850	92.700	200.000
Vietnam	412.000	40.000	30.000	482.000	40.000	5.000.000

⁵¹ Diolah dari *The Military Balance 2016*. Keterangan: MBT (*Main Battle Tank*), LT (*Light Tank*), AIFV (*Armored Infantry Fighting Vehicle*), APC (*Armored Personnel Carrier*), Recce (*Reconnaissance*), dan ACV (*Air Cushion Vehicle*). ACV = AIFV+APC+Recce.

⁵² *Provincial forces*.

Angkatan Laut

Variasi dan perimbangan persenjataan juga bisa ditelaah dari kekuatan Angkatan Laut. Hanya empat negara di Asia Tenggara yang memiliki kapal selam. Indonesia dan Malaysia terlihat berimbang karena masing-masing mempunyai dua unit (lihat Tabel 5).⁵³ Vietnam berada di urutan teratas dalam jumlah kapal selam, yaitu sebanyak enam unit. Dibandingkan dengan tiga negara lainnya yang memiliki kapal selam, Singapura justru berada di tengah; ia memiliki empat unit.

Tabel 5
Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Laut Negara-negara di Asia Tenggara (2010)⁵⁴

Negara	<i>Submarines</i>
Brunei	-
Indonesia	2
Kamboja	-
Laos	-
Malaysia	2
Myanmar	-
Filipina	-
Singapura	4
Thailand	-
Vietnam	6

⁵³ Dua unit kapal selam yang dimiliki Indonesia ini berada dalam kondisi tidak begitu layak beroperasi (lihat p. 137).

⁵⁴ Diolah dari *The Military Balance 2016*.

Angkatan Udara

Dalam hal jumlah alat pukul udara, khususnya pesawat, (lihat Tabel 6), Myanmar adalah yang terbanyak (167 unit), disusul oleh Singapura (126 unit), Indonesia (104 unit), dan Vietnam (101 unit); yang paling minim ialah Brunei dan Kamboja, dengan jumlah 5 unit; Thailand sedikit berada di atas keduanya, yaitu sebanyak 6 unit. Sementara, dari segi jumlah helikopter, yang paling banyak adalah Myanmar (81 unit), disusul oleh Singapura (76 unit). Thailand dan Vietnam selisih jumlahnya sangat tipis, masing-masing berjumlah 61 dan 60 unit; yang paling sedikit ialah Kamboja, hanya 24 unit.

Tabel 6
Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Udara Negara-negara di Asia Tenggara (2016)⁵⁵

Negara	Total	
	<i>Aircraft Combat</i>	<i>Helicopter</i>
Brunei	5	+53
Indonesia	104	42
Kamboja	5	24
Laos	15	33
Malaysia	67	62
Myanmar	167	81
Filipina	22	32
Singapura	126	76

⁵⁵ Diolah dari *The Military Balance 2016*. Total berarti jumlah yang *capable*.

Thailand	6	61
Vietnam	101	60

Kesimpulan

Konflik di Laut Tiongkok Selatan merupakan pemicu terjadinya kompetisi persenjataan antarnegara di Asia Tenggara. Dalam hal ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara tampaknya terjebak di dalam aksi-reaksi peningkatan kapabilitas militer secara signifikan. Kendatipun konstelasi politik internasional memang bersifat tidak pasti dan tidak dapat diprediksi; tetapi, bila konflik teritorial di Laut Tiongkok Selatan tidak ditangani secara kooperatif oleh para pihak yang terlibat, ia akan menggiring pada derajat ketegangan yang lebih kompleks.

Daftar Pustaka

Buku:

Buzan, Barry, *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations* (London: MacMillan Press, 1987).

Collins, Alan, *The Security Dilemmas of Southeast Asia* (London: MacMillan Press, 2000).

IISS, *The Military Balance 2012* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2012).

IISS, *The Military Balance 2013* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2013).

IISS, *The Military Balance 2014* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2014).

IISS, *The Military Balance 2015* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2015).

IISS, *The Military Balance 2016* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2016).

IISS, *The Military Balance 2016* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2016).

IISS, *The Military Balance 2016* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2016).

IISS, *The Military Balance 2016* (London: the International Institute for Strategic Studies, 2016).

Jing Huang and Sharinee Jagtiani, 'Introduction: Unknotting Tangled Lines in the South China Sea Dispute' dalam dalam Jing Huang and Andrew Billo, *Territorial Disputes in the South China Sea: Navigating Rough Waters* (New York: Palgrave Macmillan, 2015).

Morgenthau, Hans J., *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*, 6th edn, edisi Bahasa Indonesia *Politik Antarbangsa*, diterjemahkan oleh S.Maimoen, A.M. Fatwan, dan Cecep Sudrajat

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

Nguyen Thi Lan Anh, 'Origins of the South China Sea Dispute' dalam Jing Huang and Andrew Billo, *Territorial Disputes in the South China Sea: Navigating Rough Waters* (New York: Palgrave Macmillan, 2015).

NIDS, *East Asian Strategic Review 2011* (Tokyo: NIDS, 2011).

NIDS, *East Asian Strategic Review 2012* (Tokyo: NIDS, 2012).

NIDS, *East Asian Strategic Review 2015* (Tokyo: NIDS, 2015).

Weatherbee, Donald E., *International Relations in Southeast Asia: the Struggle for Autonomy*. 2nd edn. (Plymouth: Rowman & Littlefield, 2009).

Jurnal:

Ball, D., "Arms and Affluence: Military Acquisitions in the Asia-Pacific Region", *International Security*, vol. 18, no. 3, Winter, 1993/94.

Internet:

Malcolm R. Davis, 'Arms Races, Security Dilemmas and Territorial', tersedia di http://epublications.bond.edu.au/ea_ssc_publications/45/, diakses 7 Maret 2016.

SIPRI, *The SIPRI Military Expenditure Database (online)*, <<https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1988-2015.xlsx>>, diakses 13 November 2016.

Statistics Times, *List of Asian countries by Area (2014) (online)*, <<http://statisticstimes.com/geography/asian-countries-by-area.php>> diakses 13 November 2016.